

ANTARA BALI

Membangun Karakter Masyarakat Berbasis Informasi Akurat



PEMKOT DENPASAR TARGETKAN FESTIVAL LAYANGAN GAET BANYAK PESERTA ASING

PEMPROV BALI
UMUMKAN TPA
SUWUNG TAK TERIMA
SAMPAH ORGANIK
MULAI 1 AGUSTUS

Hal. 2



PEMKAB BADUNG
MULAI TERTIBKAN
48 BANGUNAN LIAR
DI PANTAI BINGIN

Hal. 7



HAL
3

Pemprov Bali Umumkan TPA Suwung Tak Terima Sampah Organik Mulai 1 Agustus

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengumumkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Sarbagita atau dikenal TPA Suwung mulai 1 Agustus 2025 tidak lagi menerima sampah organik.

"Mulai 1 Agustus 2025 TPA Regional Suwung hanya menerima sampah anorganik dan residu saja," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra di Denpasar, Kamis.

Setelah beberapa minggu menerapkan kebijakan penutupan TPA setiap hari Rabu, kata dia, kini kebijakan meningkat menjadi pembatasan jenis sampah yang boleh masuk.

Tidak berhenti pada pembatasan jenis sampah, selanjutnya TPA seluas 32,4 hektare itu juga akan ditutup secara permanen pada akhir Desember 2025.

Sekda Dewa Indra menyampaikan tahapan pembatasan hingga penghentian operasional TPA Suwung sudah tertuang

dalam Surat Gubernur Bali Nomor: B.24.600.4/3664/PSLB3P-PKLH/DKLH tertanggal 23 Juli 2025.

Surat yang ditujukan gubernur kepada Wali Kota Denpasar dan Bupati Badung itu adalah tindak lanjut dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup(LH)/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Nomor 921 Tahun 2025 tanggal 23 Mei 2025 tentang Penerapan Sanksi Administratif Berupa Paksaan Pemerintah Penghentian Pengelolaan Sampah Sistem Pembuangan Terbuka (Open Dumping) pada TPA Sampah Regional Sarbagita Suwung.

Berdasarkan Keputusan Menteri LH/Kepala BPLH tersebut, pengelolaan sampah dengan



Ilustrasi: truk pengangkut sampah saat masuk TPA Suwung atau TPA Regional Sarbagita di hari penutupan TPA setiap Rabu, Denpasar, Bali. ANTARA/Ni Putri Muliantari

sistem open dumping harus dihentikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak diterbitkannya surat tersebut.

"Selanjutnya kita wajib mengikuti tahapan dan proses yang tertuang dalam dokumen rencana penghentian pengelolaan sampah sistem open dumping," ujar Sekda Bali.

Dengan tidak lagi menerima sampah organik, Pemprov Bali mengarahkan Denpasar dan Badung mengoptimalkan operasional Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang telah terbangun maupun yang akan dibangun. (ant)

Dispar Bali Perbaiki Sistem Pungutan Wisman Agar Hotel Bisa Memungut



Kepala Dispar Provinsi Bali I Wayan Sumarajaya sebut sedang garap sistem dalam PWA agar hotel bisa bantu pungut retribusi di Denpasar, Kamis (7/8/2025). (ANTARA/Ni Putri Putri Muliantari)

DINAS Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali sedang melakukan perbaikan pada sistem Pungutan Wisatawan Asing (PWA) agar pihak ketiga seperti hotel bisa ikut membantu memungut dana tersebut.

Kepala Dispar Bali I Wayan Sumarajaya di Denpasar, Kamis,

menjelaskan dalam sistem digital yang baru nanti pihak hotel yang membantu Pemprov Bali akan mendapat akses dan menerima imbal jasa maksimal 3 persen.

"Juknisnya sudah jadi, kita tinggal perbaikan di sistem karena kerja sama dengan pihak

ketiga kita minta pihak ketiga membantu dalam pelaksanaan pengecekan dan pemungutan PWA contohnya di hotel, nanti kita akan ikat dengan PKS (perjanjian kerja sama) tersistem digital," kata dia.

Jika dahulu sistem Love Bali hanya digunakan wisatawan mancanegara untuk membayar retribusi Rp150 ribu, nantinya sistem tersebut juga akan diatur untuk mengakumulasikan imbal jasa bagi pihak ketiga seperti hotel yang ikut memeriksa dan memungut PWA ketika tamunya tiba.

Sesuai arahan Gubernur Wayan Koster, Dispar Bali berupaya mempercepat dimulainya kolaborasi ini, sebab tersisa kurang dari 5 bulan untuk mengumpulkan target Rp400 miliar pungutan wisman hingga akhir 2025.

Pada 2024 terhitung sejak Februari-Desember jumlah PWA yang terkumpul hanya Rp317,88

miliar atau 37,27 persen dari total wisman yang masuk.

"Yang jelas secepatnya, kami masih koordinasi dengan Diskominfo Bali, Biro Pemerintahan, dan Biro Hukum, PKS itu bisa masuk dalam sistem sehingga tidak ada yang bekerja manual pihak yang membantu kita dalam melakukan pungutan," ujar Sumarajaya.

Setelah kebijakan baru mendapat imbal jasa ini disuarakan, sejumlah hotel dan pelaku usaha pariwisata mulai mengajukan keikutsertaannya dalam program pungutan wisman ini.

"Nah ini sedang kita perbaiki sistemnya sambil kita sosialisasikan juknisnya, harapannya semua hotel atau pun asosiasi yang lain termasuk pelaku usaha lain ikut serta dalam proses pungutan, semakin banyak kita menjaring lebih banyak lagi pungutannya didapat," kata dia. (ant)

Pemkot Denpasar Targetkan Festival Layangan Gaet Banyak Peserta Asing

Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar, Bali, menginginkan Rare Angon Festival atau Festival Layang-layang di Pantai Mertasari, Sanur, dan Denpasar, bisa memikat lebih banyak peserta asing pada tahun depan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana di Denpasar, Selasa, mengatakan Festival Rare Angon yang telah sukses diselenggarakan pada 31 Juli hingga 3 Agustus 2025 di Pantai Mertasari tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara dari berbagai belahan dunia, serta memberi hiburan bagi warga Kota Denpasar.

"Festival ini menjadi simbol pelestarian nilai-nilai luhur budaya Bali serta wahana edukasi dan hiburan bagi masyarakat lokal maupun wisatawan mancanegara," ujar Alit Wiradana.

Sekda Alit Wiradana menyampaikan apresiasi atas pe-



nyelenggaraan Rare Angon Festival yang dinilai telah mengharumkan nama Kota Denpasar dan Bali di kancah internasional.

Sementara itu Ketua Panitia Rare Angon Festival Gede Eka Surya Wirawan menjelaskan festival ini diikuti oleh peserta dari 23 negara.

Selama empat hari pelaksanaan, rangkaian kegiatan festival tidak hanya diisi dengan kompetisi layangan tradisional, tetapi juga atraksi layangan balon berisi lampu yang dilangsungkan pada malam hari, menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.

"Di hari kedua, peserta dari 23 negara ikut serta dalam atraksi



Beberapa layang-layang menghiasi langit Kota Denpasar saat pelaksanaan Rare Angon Festival di Pantai Mertasari, Sanur, Denpasar. ANTARA/HO-Istimewa

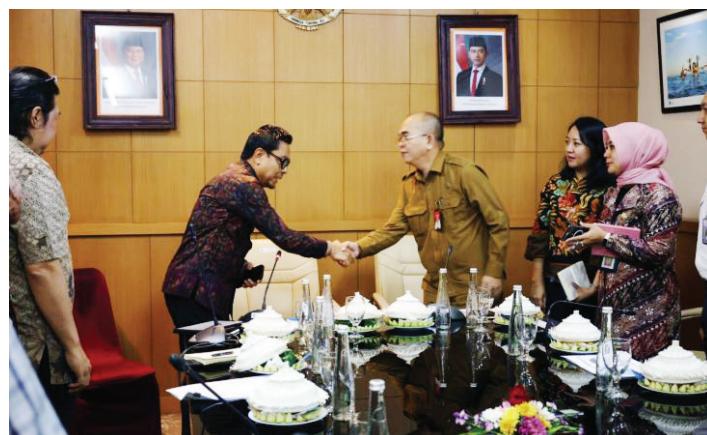
malam menerbangkan layangan balon berlampa yang memikat antusiasme masyarakat. Bahkan, karena tingginya permintaan, atraksi ini kembali digelar pada hari terakhir festival," katanya.

Ia menambahkan ke depan pihaknya berharap kegiatan

pelayangan tidak lagi dipandang sebelah mata.

"Jangan hanya dilihat dari sisi kemacetan atau insiden. Mari berkoordinasi bersama karena ini bagian dari budaya, tradisi, dan hiburan masyarakat Denpasar dan Bali," imbuhnya. (ant)

Pemkot Denpasar: Inovasi Teba Modern Jadi Solusi Pengelolaan Sampah



Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa saat menerima perwakilan Kemendagri, Kementerian PUPR, dan Bank Dunia di Kantor Wali Kota Denpasar, Bali, Selasa (5/8/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar

PEMERINTAH Kota Denpasar menyatakan inovasi teba modern bisa menjadi salah satu solusi alternatif pengelolaan sampah secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

"Dengan konsep ini warga dapat mengelola sampah daun dan sisanya tanaman di pekarangan rumah mereka melalui lubang atau

sumur khusus yang menghasilkan kompos alami," ujar Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa saat menerima perwakilan Kemendagri, Kementerian PUPR, dan Bank Dunia di Kantor Wali Kota Denpasar di Bali, Selasa.

Arya menjelaskan teba modern merupakan bentuk adaptasi dari

kearifan lokal masyarakat Bali dalam mengelola sampah organik. Secara sederhana, teba berupa sebuah lubang di pekarangan rumah yang digunakan untuk menampung sampah organik untuk kemudian dijadikan kompos.

Menurut Arya, pemanfaatan teba modern tidak hanya mendekatkan pengolahan sampah ke sumbernya, namun juga berkontribusi dalam mengurangi beban TPA dan mendukung ekonomi sirkular.

Terkait pengentasan masalah sampah di Denpasar, Pemkot Denpasar menjalin hubungan strategis dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Bank Dunia melalui program Integrated Sustainable Waste Management Program (ISWMP).

Sinergi tersebut dimulai dengan pelaksanaan rapat koordinasi antara Pemerintah Kota Denpasar

yang dipimpin Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa dengan Direktur SUPD I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, perwakilan Kementerian PUPR Direktorat Sanitasi Edison Siagian, dan Ketua CPMU ISWMP Bank Dunia Sandhi Eko Bramono.

Edison Siagian dari Direktorat Sanitasi Kementerian PUPR menekankan pentingnya penyediaan sarana pendukung dalam pengelolaan sampah, seperti tempat pengumpulan sampah terpilah, sarana pengangkutan residu hasil olahan, serta pengoptimalan operasional dan pemeliharaan fasilitas pengolahan sampah yang sudah ada.

Dia menilai inisiatif Pemerintah Kota Denpasar dengan fokus memperbaik teba modern dianggap mampu menjadi percontohan nasional dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan kearifan lokal. (ant)

Kementerian PU Pastikan Pembangunan TPST di Gianyar Bali Berlanjut

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) memastikan pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) di Kabupaten Gianyar, Bali, tetap berlanjut yang pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

"Terus sekarang diupayakan dengan pendanaan lain (APBN)," kata Kepala Sub Direktorat Wilayah I Direktorat Sanitasi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Sandi Eko Bramono Poedjastanto di Gianyar, Bali, Rabu.

Menurut dia, Program the Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Program (ISWMP) untuk pembangunan TPST di Gianyar mengalami pembatalan karena perubahan kebijakan dari Kementerian PU.

Awalnya, TPST di Gianyar rencananya dibangun di Tempat

Pemrosesan Akhir (TPA) Temesi dengan menggunakan dana dari Bank Dunia.

Namun karena ada perubahan kebijakan, ia menjelaskan akan dilakukan melalui pembiayaan menggunakan APBN.

Melalui ISWMP, lanjut dia, pihaknya akan melakukan peningkatan pengolahan sampah di hulu sebagai daerah percontohan pengolahan sampah untuk 70 ton per hari, dengan target 50 persen sampah dapat dikurangi.

Di sela melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gede Mayun, Sandi Eko meminta pemerintah setempat untuk menentukan daerah atau kawasan yang akan dijadikan percontohan.

Ia berharap dengan adanya kawasan percontohan yang akan difasilitasi kendaraan pengangkut sampah yang terpisah, akan mengurangi pengiriman sampah



Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gede Mayun (kiri) menerima audiensi Kepala Sub Direktorat Wilayah I Direktorat Sanitasi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Sandi Eko Bramono Poedjastanto di Gianyar, Bali, Rabu (6/8/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkab Gianyar

ke TPA.

"Kawasan percontohan akan difasilitasi kendaraan pengangkut sampah yang terpisah, terus kemudian manajerialnya diatur, sehingga 50 persen sampah bisa dikurangi. Hal tersebut akan membantu terhadap pembang-

nan TPST berikutnya yang akan dibangun," ujarnya.

Sandi juga mengapresiasi Pemkab Gianyar atas komitmennya dalam penanganan permasalahan sampah, dengan berkurangnya jumlah sampah yang dikirim ke TPA Temesi setiap hari. (ant)

Sekolah Rakyat di Tabanan Bali Optimalkan Ketersediaan Guru



Peserta didik mengikuti kelas kurikulum persiapan di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 di Kediri, Tabanan, Bali, Senin (4/8/2025). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

SEKOLAH Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, Bali, mengoptimalkan ketersediaan 12 orang guru untuk menyiasati kekurangan tiga orang tenaga pendidik tersebut.

"Seharusnya 15 orang guru tapi ada yang mundur atau tidak mendaftar ulang," kata Kepala Se-

kolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan I Putu Jaya Negara di Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, Senin.

Sekolah yang setara SMP itu merupakan sekolah rakyat satu-satunya saat ini ada di Pulau Dewata yang berada di Sentra Mahatmiya Bali yang dikelola oleh

Kementerian Sosial.

Saat ini pihaknya kekurangan tiga guru masing-masing untuk mata pelajaran agama Hindu, Katolik dan Bimbingan Konseling (BK).

Pihaknya telah berkonsultasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Agama untuk formasi tiga guru tersebut.

Saat ini, sekolah tersebut dilengkapi 12 orang guru serta satu orang kepala sekolah dan dibantu dua orang wali asrama dan delapan orang wali asuh.

Selain membutuhkan tambahan tenaga pendidik, pihaknya juga belum memiliki petugas kebersihan yang idealnya membutuhkan dua orang serta kekurangan juru masak yang saat ini baru ada satu orang atau masih kurang tiga orang.

Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan memiliki 75 orang siswa dan siswi yang berasal dari keluarga tidak mampu

di Bali, yang terbagi dalam tiga kelas.

Mereka terdiri atas 36 perempuan dan laki-laki 39 orang, masing-masing dari Kabupaten Tabanan ada 61 orang, Kabupaten Buleleng (7), Denpasar (4), dan Kabupaten Badung (3) orang.

Peserta didik tersebut tinggal di asrama dalam kawasan itu selama menempuh pendidikan.

Saat ini, para pelajar tersebut telah melewati masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) pada 14 Juli 2025 dan saat ini sudah memasuki kurikulum persiapan yang dijadwalkan berlangsung selama dua bulan.

Beberapa materi yang diajarkan pada masa persiapan itu di antaranya pendidikan karakter, kedisiplinan hingga materi terkait kewirausahaan.

Setelah persiapan, pelajar tersebut akan memasuki belajar dengan kurikulum nasional yang diperkirakan pada Oktober 2025. (ant)

Pemkab Badung Terima Hibah Tanah Rampasan KPK RI Senilai Rp26 Miliar

Pemerintah Kabupaten Badung menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa enam bidang tanah hasil rampasan tindak pidana korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dengan total nilai lebih dari Rp26 miliar.

Serah terima hibah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Anti Korupsi itu berlangsung di Ruang Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan Badung, Selasa (15/7). Aset tersebut diserahkan Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK RI Mungki Hadipratikto, dan diterima Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta.

Enam bidang tanah tersebut berlokasi di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara dengan luas total 2.065 meter persegi. Nilai total aset hibah tercatat mencapai Rp26,74 miliar.

"Atas nama pemerintah dan masyarakat Badung, kami menyampaikan terima kasih kepada KPK atas kepercayaan memberi-

kan hibah ini. Aset ini akan kami manfaatkan untuk kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok," kata Wabup Bagus Alit Sucipta.

Ia menjelaskan, tanah hibah tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas publik dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemkab Badung berencana memanfaatkannya untuk mewujudkan program strategis Sapta Kriya Adi Cipta, khususnya pembangunan taman kreatif desa sebagai ruang aktivitas masyarakat.

Direktur Labuksi KPK RI Mungki Hadipratikto mengatakan, aset tanah itu merupakan hasil rampasan perkara tindak pidana korupsi bantuan sosial Covid-19. Aset sebelumnya telah



Wabup Bagus Alit Sucipta (tengah) menerima hibah BMN Hasil Rampasan KPK RI dari Direktur Labuksi KPK RI Mungki Hadipratikto saat acara hibah aset dan Sosialisasi Anti Korupsi di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Selasa (15/7). (ANTARA/HO-Pemkab Badung)

dua kali dilelang namun tidak ada peminat, sehingga dipindah-tangankan melalui hibah kepada Pemkab Badung.

"Setelah serah terima, KPK akan melakukan monitoring untuk memastikan proses balik nama ke barang milik daerah dan pemanfaatan aset sesuai

kepentingan publik," ujarnya.

Plt Kepala BPKAD Badung I Ketut Wisuda menjelaskan, hibah itu berawal dari permonoran resmi Bupati Badung kepada KPK untuk mengalihkan enam bidang tanah sitaan di Kerobokan Kelod menjadi aset daerah. (adv)

Pemkab Purworejo dan Pemkab Badung Jajaki Kerja Sama Pariwisata



Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menerima kunjungan kerja Bupati Purworejo Provinsi Jawa Tengah Yuli Hastuti di Puspem Badung, Bali, Rabu (16/7/2025).
ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Badung, Bali, untuk menjajaki kerja sama kedua

daerah di sektor pariwisata.

"Kami berterima kasih kepada Bupati Purworejo dan jajaran yang sudah berkunjung ke Badung untuk mem-

bahas rencana kerja sama pengembangan pariwisata di kedua kabupaten," ujar Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa di Mangupura, Rabu.

Ia menjelaskan secara umum sektor pariwisata memang memiliki dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup menjanjikan untuk terus dikembangkan.

Untuk itu, pihaknya juga terus mengembangkan sektor pariwisata khususnya yang berbasis budaya, yang didukung juga dengan panorama alamnya yang ada seperti pantai, lembah dan gunung.

Adi Arnawa juga berterima kasih atas ajakan dan kesempatan yang diberikan Pemkab Purworejo kepada Pemkab Badung untuk berinvestasi di sektor pariwisata.

"Mudah-mudah di tahun

mendatang hal itu bisa terwujud dan saat ini Pemkab Badung sedang fokus pada penanganan infrastruktur," ungkap dia.

Bupati Purworejo Yuli Hastuti mengatakan dalam kunjungan kerja itu Pemkab Purworejo berharap bisa menjalin kerja sama dengan Pemkab Badung di sektor pariwisata.

Kerja sama itu dilakukan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Purworejo dengan meyakini Badung merupakan pintu gerbang masuknya wisatawan mancanegara.

"Kami berharap dengan adanya kerja sama ini Pemkab Badung bisa menjadi mentor Pemkab Purworejo dalam pengembangan pariwisata di Purworejo," kata dia. (adv)

Dua Koperasi Desa Merah Putih Sudah Beroperasi di Kabupaten Badung

BUPATI Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan sebanyak dua Koperasi Desa Merah Putih telah beroperasi di wilayah kabupaten setempat.

"Di Badung sudah terbentuk Kelembagaan Koperasi Merah Putih di semua desa/kelurahan yang jumlahnya 62. Sedangkan yang sudah operasional ada dua yaitu Kopdes Merah Putih Kutuh dan Bongkasa Pertiwi," ujar Bupati Adi Arnawa di Mangupura, Kabupaten Badung, Bali, Senin.

Ia mengatakan peluncuran kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) itu diharapkan mampu memberdayakan masyarakat lokal.

Selain itu, kelembagaan tersebut diharapkan agar dapat menciptakan kemandirian ekonomi dan mewujud-

kan swasembada pangan, serta memperkuat ketahanan ekonomi desa.

"Seiring dengan persiapan yang dilakukan, kami mendorong semua Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Badung dapat beroperasi, sehingga mampu memberdayakan masyarakat lokal dan kemandirian ekonomi di desa/kelurahan," kata dia.

Saat menghadiri peluncuran koperasi tersebut di Desa Kutuh, Badung Bupati Adi Arnawa menjelaskan bahwa Kopdes Merah Putih Kutuh sudah memiliki 481 anggota dan telah melakukan kolaborasi dengan tujuh BUMN.

"Koperasi ini memberikan layanan gerai sembako, simpan pinjam, pangkalan gas elpiji, pupuk non subsidi, apotek desa dan gudang koperasi," kata dia.



Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat mengikuti acara Peluncuran Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) secara daring dari Wantilan Rangdu Kriya Mandala, Desa Kutuh, Kuta Selatan, Bali, Senin (21/7/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

Dalam operasionalnya, kegiatan usaha Koperasi Merah Putih akan difasilitasi dan didorong dengan menyediakan gerai-gerai seperti sembako, outlet elpiji 3

kg, klinik dan apotek desa, simpan pinjam, sarana logistik desa, agen pupuk dan pembayaran listrik, berkolaborasi dengan BUMN. (adv)

Pemkab Badung Siapkan Kartu Kredit Minimalisir Kecurangan Transaksi



Sekretaris Daerah Badung IB. Surya Suamba saat membuka kegiatan sosialisasi pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah tahun 2025 di Ruang Kerta Gosana Puspem Badung, Bali, Senin (21/7/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, menyiapkan pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) tahun 2025 bekerja sama dengan Bank BPD Bali untuk meminimalisir kecurangan transaksi keuangan.

"Penggunaan KKPD ini berdasarkan ketentuan dari pusat dan pemanfaatan belanja ke-

depannya wajib secara cashless guna memudahkan dan meminimalisir terjadinya kesalahan dan kecurangan dalam bertransaksi," ujar Sekretaris Daerah Badung IB. Surya Suamba di Mangupura, Kabupaten Badung, Bali, Senin.

Ia mengatakan penggunaan KKPD ini penting khususnya di era digitalisasi. Seiring perkem-

bangunan dan teknologi semua dituntut untuk memberikan pelayanan berbasis digital atau elektronik.

Untuk itu, menurut Surya Suamba pihaknya melakukan sosialisasi kepada PA/KPA (pemegang KKPD), PPK-SKPD, PPTK, bendahara pengeluaran dan bendahara pengelu-

aran pembantu masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Badung.

"Sosialisasi ini dilakukan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka partisipatif, inovatif dan akuntabel dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik," kata dia.

Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung Ketut Wisuda menambahkan kegiatan sosialisasi pelaksanaan KKPD itu dilakukan berdasarkan amanat Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan serta Penyelenggaraan KKPD.

"Ini dilakukan untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, yang bertujuan untuk mendorong implementasi, elektronifikasi dan transaksi keuangan," kata Ketut Wisuda. (adv)

Pemkab Badung Mulai Tertibkan 48 Bangunan Liar di Pantai Bingin

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Badung melakukan penertiban dengan membongkar 48 unit bangunan liar yang berada di kawasan Pantai Bingin, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali.

"Pembongkaran bangunan tanpa izin di sekitar kawasan Pantai Bingin ini sudah sesuai dengan standar prosedur operasional dan sudah bersurat kepada pemilik bangunan," ujar Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa di Badung, Senin.

Ia mengatakan pihaknya sudah menjalankan prosedur dan telah memberikan teguran tertulis sebanyak tiga kali sebelum melaksanakan penertiban bangunan ilegal itu.

"Hari ini terakhir, jadi kami langsung eksekusi sesuai dengan surat perintah pembongkaran yang telah dikeluarkan," kata dia.

Adi Arnawa mengatakan Pemkab Badung juga akan mempertimbangkan untuk berdialog den-

gan para pekerja yang terdampak dengan adanya pembongkaran tersebut.

Namun, ia menegaskan proses dialog akan dilaksanakan setelah selesainya proses pembongkaran bangunan liar yang diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu bulan.

"Tentu kami akan pertimbangkan harapan para pekerja ini. Saya tidak akan meninggalkan rakyat dan akan membuka dialog nanti. Tapi, setelah ini tuntas dulu, kami akan langkah demi langkah," ungkap dia.

Gubernur Bali Wayan Koster yang hadir dalam proses penertiban menjelaskan pembongkaran itu dilakukan karena bangunan ilegal itu berada di atas lahan milik Pemkab Badung, bukan di atas lahan milik pribadi.

Dia menegaskan hal tersebut tidak boleh dibiarkan karena akan dapat merusak Pulau Bali ke depan.

"Kami bukan tidak melindungi



Gubernur Bali Wayan Koster dan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat memantau proses pembongkaran 48 bangunan liar di kawasan Pantai Bingin, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Senin (21/7/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

pekerja, kami melindungi, tapi kalau tidak tertib, melanggar aturan, menggunakan aset orang lain, tentu ini tidak bisa dibiarkan," kata dia.

Ia mengatakan nantinya Pemerintah Provinsi Bali juga membentuk tim audit untuk

menginvestigasi perijinan pariwisata di seluruh wilayah Provinsi Bali.

"Ini untuk menindak tegas para pelanggar dan tentunya melalui proses sesuai dengan undang-undang," ujar Wayan Koster. (adv)

Ranperda RPJMD Badung Muat Program Prioritas Pembangunan Daerah



Bupati Badung Wayan Adi Arnawa saat menyampaikan penjelasan terhadap tiga dokumen pada Rapat Paripurna DPRD Badung, di Ruang Utama Gosana, Kantor DPRD Badung, Bali, Selasa (22/7/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

BUPATI Badung, Bali, I Wayan Adi Arnawa mengatakan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sementara Berencana Badung Tahun 2025-2029 memuat sejumlah program prioritas pembangunan di daerah itu.

"Ranperda ini memuat visi, misi dan program prioritas

pembangunan daerah serta proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah," ujar Bupati Adi Arnawa saat Rapat Paripurna DPRD Badung di Mangupura, Kabupaten Badung, Bali, Selasa.

Ia mengatakan salah satu program prioritas yang dirancang dalam RPJMD itu yakni pembangunan infrastruktur jalan untuk

mengatasi kemacetan khususnya di kawasan pariwisata.

Untuk mendukung program tersebut pihaknya juga telah merancang skema pinjaman daerah kepada perbankan selama lima tahun ke depan.

"Pembangunan infrastruktur di kawasan pariwisata merupakan bentuk dukungan Pemkab Badung terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Bali dan nasional," kata dia.

Selain infrastruktur jalan, Pemkab Badung akan membangun perusahaan daerah baru guna menunjang pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja.

"Ini dilakukan juga sebagai upaya pendistribusian potensi-potensi di wilayah Badung yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kami," kata dia.

Selain menjelaskan terkait

Ranperda RPJMD, pada rapat paripurna itu, Bupati Adi Arnawa juga memberikan penjelasan terkait dua dokumen lainnya yakni Ranperda tentang Perubahan atas Perda Badung No. 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Menurut dia, Ranperda perubahan atas Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat segera dibahas bersama sehingga menjadi payung hukum dalam implementasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

"Sehingga hal dapat mendukung pencapaian program prioritas dan penguatan kapasitas fiskal dalam rangka mewujudkan kemandirian keuangan daerah," kata Bupati Adi Arnawa. (adv)

Pemkab Badung Evaluasi Pendataan Potensi Pajak Daerah

DINAS Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung, Bali, melakukan rapat evaluasi pendataan potensi pajak daerah.

"Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Badung IB. Surya Suamba di Mangupura, Kabupaten Badung, Rabu.

Ia mengatakan Pemkab Badung berupaya meningkatkan penerimaan pajak daerah guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat.

Untuk itu, rapat evaluasi itu dilakukan dalam upaya optimalisasi pajak daerah dan memaksimalkan pendataan pajak.

"Melalui rapat evaluasi ini, Bupati Badung menginginkan kedewasaan pelayan masyarakat harus semangat dan bertanggung jawab serta sadar

dalam tugas ini," kata dia.

Kepala DPMPTSP Badung I Made Agus Aryawan menjelaskan rapat evaluasi pendataan potensi pajak tersebut merupakan kebijakan strategis dari Bupati dan Wakil Bupati Badung untuk mendata dari lingkup dan objek pendataan potensi pajak daerah.

Potensi pajak daerah itu terdiri dari lima objek pajak yakni Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan Minuman, PBJT atas Jasa Perhotelan, Jasa Kesenian dan hiburan, Pajak Reklame serta Pajak Air dan Tanah.

Tahapan pendataan potensi pajak daerah yang difasilitasi oleh Bapenda Kabupaten Badung sesuai tugas pokok dan fungsinya, sehingga Bupati Badung menggerakkan semua kepala desa termasuk kepala lingkungan," kata dia.

Ia menambahkan latar belakang optimalisasi pajak daerah itu dilakukan melalui intervensi



Sekda Badung IB. Surya Suamba saat memimpin rapat evaluasi pendataan potensi pajak daerah di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Rabu (23/7/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

para pimpinan dengan melibatkan semua pihak serta dengan pemahaman yang sama.

"Upaya ini melibatkan petugas pendataan dari luar Bapenda yang bertugas mengumpulkan data, mencatat dan

mengedukasi tentang peraturan pajak daerah. Petugas pendataan juga bertugas membantu wajib pajak melaporkan kewajiban pajaknya yang rutin setiap bulan," pungkas Agus Aryawan. **(adv)**

Pemkab Badung Minta Masyarakat Gunakan Balai Desa Untuk Pelestarian Adat



Bupati Badung Wayan Adi Arnawa meresmikan Bale Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita, Jumat (25/7/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, meminta masyarakat untuk memanfaatkan balai desa adat untuk berbagai kegiatan positif, khususnya dalam pelestarian adat dan budaya.

"Balai desa ini kami harap dapat digunakan untuk kegiatan

pelestarian seni, adat, agama, tradisi dan budaya," ujar Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat meresmikan Bale Desa Adat Kerobokan, Badung, Jumat.

Ia mengatakan Pemkab Badung mengapresiasi Desa Adat Kerobokan yang telah berhasil mewujudkan pemban-

gunan Balai Desa Adat tersebut.

Pihaknya juga mendukung pembangunan itu melalui dukungan dana hibah Pemkab Badung tahun 2024 senilai Rp4 miliar.

Bangunan Balai Desa Adat Kerobokan itu dibangun dengan dilengkapi dengan ruang basement dengan kapasitas parkir 300 sepeda motor.

Baca juga: Ranperda RPJMD Badung muat program prioritas pembangunan daerah

Ada lantai I terdapat Gudang, Ruangan Staf, Ruang Rapat Kerta Adhyaksa, Ruangan Prajuru, Bendesa Adat dan Toilet. Lantai 2, ada ruangan Rapat Kerta Sabha Bhuwana dengan kapasitas 200 orang.

"Kami mendukung desa adat terlebih saat ini desa adat telah memiliki lembaga Kerta Adhyaksa sebagai wadah atau media yang diharapkan dapat menye-

lesaikan masalah di masyarakat berbasis musyawarah mufakat," kata dia.

Bupati Adi Arnawa menambahkan Pemkab bersama DPRD Badung juga berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Badung termasuk masyarakat di kawasan desa adat.

Untuk itu, pihaknya sedang merancang program beasiswa kuliah.

Pada tahun anggaran 2026 sudah dirancang sebanyak 400 beasiswa bagi masyarakat yang berniat kuliah dengan kriteria, masyarakat yang kurang mampu dan yang berprestasi.

"Nantinya masyarakat dapat menyampaikan proposal ke Bupati yang akan diverifikasi oleh Instansi teknis. Setiap orang akan dibantu sebesar Rp75 juta per tahun," pungkas Bupati Adi Arnawa. **(adv)**

GOW Badung Pantau Perkembangan WBP di Lapas Perempuan Kerobokan

GABUNGAN Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Badung, Bali memantau perkembangan serta kemajuan para warga binaan pemasyarakatan (WBP) dan anak-anak di lingkungan Lapas Perempuan Kerobokan.

"Kami ingin kegiatan ini menjadi awal dari perubahan yang lebih baik. Dengan dukungan yang tepat, mereka bisa bangkit dan menjadi bagian positif dari bangsa ini," ujar Ketua GOW Badung Yunita Alit Sucipta pada aksi sosial peringatan Hari Anak Nasional di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan, Badung, Jumat.

Ia menyebut gotong royong dan empati sangat penting untuk dilakukan dalam membangun masyarakat yang peduli terhadap sesama tanpa memandang latar belakang.

"Kami percaya bahwa setiap individu, termasuk para warga

binaan, memiliki potensi untuk tumbuh dan berkontribusi bagi masyarakat jika diberi kesempatan," kata dia.

Yunita menjelaskan aksi sosial yang dilakukan merupakan kegiatan perdana GOW Badung periode 2025-2030.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap tumbuh kembang anak-anak yang berada di lingkungan lapas, pihaknya juga menyerahkan sejumlah bantuan di antaranya satu unit mesin jahit, susu untuk ibu hamil dan balita, serta diaper untuk bayi dan balita.

"Bantuan yang kami serahkan hari ini tidak hanya bernilai materi, tetapi juga sebagai simbol kasih dan harapan," kata dia.

Ia menambahkan bahwa GOW Kabupaten Badung memilih Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan karena pihaknya mendapat informasi



GWO Kabupaten Badung yang dipimpin Yunita Alit Sucipta (kedua kiri) saat kegiatan aksi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan, Jumat (25/7/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

bawa terdapat anak-anak yang ikut tumbuh kembang di lapas tersebut.

"Kami ingin hadir memberi

semangat dan dukungan moril, sekaligus simbol bahwa mereka tidak sendiri," pungkas Yunita Alit Sucipta. **(adv)**

WHDI Badung Minta Anak Muda Jadi Agen Toleransi Dan Kerukunan



Ketua WHDI Kabupaten Badung Nyonya Yunita Alit Sucipta menjadi narasumber pada kegiatan Grebek Kerukunan di SMAN 1 Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali, Senin (28/7/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

KETUA Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Badung, Bali, Yunita Alit Sucipta meminta generasi muda dapat menjadi agen toleransi dan kerukunan.

"Indonesia memiliki banyak suku, adat, agama, ras dan golongan. Semua harus memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika. Harus bisa menerima perbedaan karena semuanya bersaudara," ujarnya pada kegiatan Grebek Kerukunan di SMAN 1 Abiansemal Badung, Senin.

Ia menjelaskan nilai-nilai dasar kerukunan dan toleransi pertama kali diajarkan di lingkungan paling dasar yaitu keluarga dan sekolah.

Dalam proses tersebut seorang ibu akan menjadi orang yang memberikan ajaran kerukunan dan toleransi kepada anak-anaknya.

"Seorang ibu yang toleran dan terbuka itu akan melahirkan anak-anak yang moderat dan berpikiran terbuka serta anak-anak

yang memiliki nilai toleransi yang tinggi," kata dia.

Yunita Alit Sucipta mengatakan untuk menjaga kerukunan dan toleransi salah satu hal yang dapat dilakukan generasi muda adalah dengan berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial.

"Kalau ada berita yang viral terlebih mengenai agama harus bijak menyikapinya dengan memberikan komentar yang positif. Jangan justru menjadi provokator, karena komentar negatif akan menyulut perpecahan," kata dia.

Pada kesempatan itu ia juga mengajak seluruh siswa dan jajaran guru SMAN 1 Abiansemal untuk saling menjaga agar tidak terjadi kasus perundungan di sekolah.

"Tindakan perundungan bisa menyakiti perasaan dan mental. Mari merangkul teman dan memiliki sifat saling peduli dan cinta kasih," pungkas Yunita Alit Sucipta. **(adv)**

Bupati Badung Minta Pemuda Jaga Budaya dan Tradisi Bali

BUPATI Badung, Bali, I Wayan Adi Arnawa meminta para generasi muda untuk terus menjaga kelestarian budaya dan tradisi Bali.

"Pengurus yang baru dilantik harus menggembangkan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jangan muluk-muluk yang penting pemuda ikut menjadi benteng budaya," ujar Bupati Adi Arnawa saat Pelantikan Pengurus STT Tengah Gulingan periode tahun 2025-2027 di Kabupaten Badung, Sabtu (26/7).

Ia mengatakan para pemuda yang dilantik menjadi pengurus kelompok pemuda tersebut harus mampu membuat program kerja yang mendukung kearifan lokal dan budaya setempat.

Bupati Adi Arnawa juga mengapresiasi kelompok pemuda STT Tengah Gulingan yang telah berupaya menjaga Seni dan Budaya Bali seperti dengan menampilkan beragam kesenian tari dan tabuh.

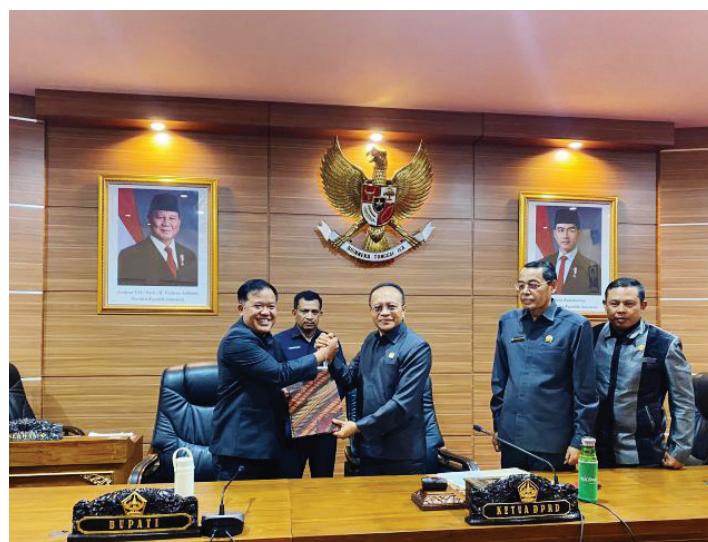
"Saya sudah lihat Sekaa Gong sudah luar biasa dan juga sudah ada Tari Maskot Desa Gulingan. Ayo buat dan tampilkan kesenian yang lain lagi, karena saya tahu di Desa Gulingan banyak terdapat seniman-seniman yang hebat," kata dia.

Pada kesempatan ini, Bupati Adi Arnawa menyampaikan secara bantuan dana sebesar Rp. 20 juta yang diterima langsung oleh Ketua STT Tengah Gulingan Nyoman Wika Arya. (adv)



Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri HUT Ke-56 STT. Tengah Gulingan, Banjar Tengah Kaler dan Tengah Kelod, Desa Gulingan, Mengwi, Sabtu (26/7). ANTARA/HO-Pemkab Badung

DPRD Setujui Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Bangli Tahun 2025



Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika (kanan) dan bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta berjabatan tangan setelah rancangan perubahan APBD Bangli tahun 2025 disetujui. (ANTARA/HO-Humas Bangli)

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangli, Provinsi Bali memutuskan untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Ka-

bupaten Bangli tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna yang digelar di Bangli, Selasa.

Dalam siaran pers Diskominfo Bangli, Ketua DPRD Bangli

I Ketut Suastika menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun Ranperda Perubahan APBD tersebut.

Ia juga menyatakan penyusunan Ranperda APBD Bangli telah mengacu dan mempedomani perubahan rencana kerja pemerintah daerah, perubahan kebijakan umum APBD, dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Bangli ini dihadiri oleh jajaran anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli serta undangan terkait lainnya.

Penetapan Ranperda Perubahan APBD ini merupakan langkah krusial dalam memastikan alokasi anggaran yang lebih responsif terhadap dinamika

kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Bangli.

Sejumlah penyesuaian dilakukan untuk mengakomodasi prioritas-prioritas baru serta mengoptimalkan penggunaan dana demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut tertuang dalam keputusan DPRD Kabupaten Bangli Nomor B.100.3.3/9/DF/DPRD, tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2025.

Dalam pidatonya Bupati Bangli, SN Sedana Arta mengucapkan terima kasih atas semangat, kerja keras dan kerja sama para anggota DPRD, sehingga Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Bangli tahun 2025 tersebut dapat disetujui. (ant)

Bupati Buleleng bagikan Bendera Merah Putih Bangkitkan Nasionalisme

BUPATI Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Wakil Bupati I Gede Supriatna turun langsung membagikan Bendera Merah Putih kepada masyarakat di Kota Singaraja dalam rangkaian peringatan HUT Ke-80 Republik Indonesia untuk membangkitkan semangat nasionalisme.

"Saya dan wakil bupati serta jajaran pimpinan daerah, organisasi kemasyarakatan, dan Paskibraka Buleleng 2025 turun bersama membagikan Bendera Merah Putih sebagai upaya nyata meningkatkan rasa nasionalisme pada HUT Kemerdekaan RI di kalangan masyarakat luas," kata I Nyoman Sutjidra di Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, Jumat.

Ia mengapresiasi semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat yang turut menyuarakan peringatan kemerdekaan melalui aksi nyata pembagian Bendera Merah Putih dan kegiatan sosial lainnya.

"Hari ini kita berbagi Bendera

Merah Putih sebagai bentuk cinta tanah air. Mari kita bangkitkan semangat untuk terus mencintai negeri ini, Republik Indonesia," ujarnya.

Kegiatan pembagian Bendera Merah Putih tersebut dirangkaikan dengan aksi sosial donor darah yang melibatkan partisipasi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Donor darah ini menjadi bentuk apresiasi dan solidaritas kepada sesama, sebagai wujud pengamalan nilai-nilai kemanusiaan yang juga menjadi bagian dari semangat kemerdekaan.

Sutjidra juga mengajak seluruh peserta untuk membagikan Bendera Merah Putih kepada masyarakat yang melintas di depan Taman Kota Induk sebagai simbol penyebaran semangat nasionalisme.

Gerakan pembagian Bendera Merah Putih tersebut merupakan simbol semangat persatuan dan gotong royong masyarakat



Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra membagikan Bendera Merah Putih di salah satu ruas jalan di Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, Jumat (8/8/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkab Buleleng

Buleleng dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan dukungan dari berbagai elemen, termasuk organisasi kemasyarakatan dan instansi vertikal seperti Polres dan Kejari Buleleng, kegiatan berlangsung lancar.

Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Buleleng, Pemkab berhasil mengumpulkan sebanyak 8.000 lebih Bendera Merah Putih berbagai ukuran. Sebagian di antaranya merupakan hasil donasi dari organisasi kemasyarakatan. (ant)

Umat Hindu Buat Upacara Penyucian Selat Bali Pasca Tenggelam KMP Tunu Pratama



Umat Hindu menggelar upacara pakelem untuk menyucikan dan mohon keselamatan di Selat Bali, Kabupaten Jembrana, Jumat (25/7/2025). ANTARA/Gembong Ismadi

UMAT Hindu di Kabupaten Jembrana menggelar upacara pakelem untuk menyucikan dan mohon keselamatan di Selat Bali, Jumat, pascatenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya yang menimbulkan korban jiwa.

Ketua panitia penyelenggara yang juga Lurah Gilimanuk Ida

Bagus Tony Wirahadikusuma mengatakan upacara dengan puncak larung sesaji ke laut ini merupakan kegiatan bersama masyarakat, PT. ASDP Indonesia Ferry dan Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Ketapang-Gilimanuk.

"Untuk biaya upacara pakelem yang besar hasil gotong royong ASDP, Gapasdap dan masyarakat. Dengan upacara ini kami harap keselamatan menyertai di Selat Bali," katanya.

Dia mengatakan, bagi masyarakat Bali, selat tersebut bukan hanya sekedar lautan tetapi juga sumber kehidupan dan spiritual.

Upacara ini dipusatkan di dermaga Landing Craft Machine (LCM) Pelabuhan Gilimanuk dengan dipimpin tiga rohaniawan yaitu Ida Pedanda Istri Nabe Manuaba dari Griya Manistutu Melaya, Ida Pandita Nabe Mpu Reka Kusuma Ananda dari Griya Arum Gilimanuk, dan Ida Rsi Agung Ananda Yoga Pinatih dari Griya Samiana Gilimanuk.

Setelah prosesi di dermaga LCM selesai, dengan menggunakan KMP Agung Samudera IX, sesaji yang sudah disiapkan dilarung di Selat Bali.

Kapolres Jembrana Ajun

Komisaris Besar Polisi (AKBP) Kadek Citra Dewi Suparwati yang hadir dalam upacara ini mengatakan pihaknya bersama TNI AL dan Basarnas mengamankan jalannya upacara yang diikuti sekitar 600 Umat Hindu tersebut.

"Upacara keagamaan ini sebagai bentuk ikhtiar untuk keselamatan semua pihak. Selat Bali merupakan jalur penting yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali, namun memiliki resiko yang tinggi," katanya.

Gubernur Bali I Wayan Koster dalam sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Perhubungan Gde Wayan Samsi Gunarta mengajak untuk menghormati lautan, sebagai sumber kehidupan sekaligus ruang spiritual.

Senada dengan itu, Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna menekankan pentingnya menjaga keharmonisan alam, melalui pendekatan budaya dan nilai-nilai lokal seperti Tri Hita Karana. (ant)

DPRD Bali Kebut Raperda Bale Kertha Adhyaksa Ide Kajati

DPRD Bali memproses dengan cepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bale Kertha Adhyaksa Desa Adat di Bali yang ide awalnya berasal dari Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.

Wakil Ketua DPRD Bali IGK Kresna Budi di Denpasar, Kamis, menargetkan Raperda ini rampung dalam satu minggu yaitu pada Kamis, 14 Agustus 2025.

"Kalau bisa seminggu, kenapa tidak, karena sudah klopi ini tidak ada yang perlu diubah, ada sedikit yang diubah kan selesai," kata dia.

Diketahui Raperda Bale Kertha Adhyaksa Desa Adat di Bali sendiri baru diajukan Gubernur Bali pada Sidang Paripurna DPRD Bali Rabu (6/8) kemarin.

Pagi ini dewan yang dikordinir oleh Komisi I dan IV langsung memulai pendalaman bahkan menghadirkan langsung Kajati Bali I Ketut Sumedana.

"Makanya saya bilang bagus, kalau bisa secepatnya jangan sam-

pai mengulur, terlihatnya terkesan tergesa-gesa, tapi kalau melihat perjalanan Pak Kajati ke seluruh Bali sebenarnya sudah berjalan, sudah sering kita bahas juga," ujar Kresna Budi.

Meski Raperda ini diajukan Pemprov Bali, DPRD Bali menyebut inisiasi awalnya dari Kajati Bali, karena pucuk di kejaksaan itu melihat kerap kali masalah viral di Bali larinya ke pengadilan formal, padahal semestinya dapat diselesaikan di desa.

"Selama ini sering terjadi hal-hal kecil di desa sampai menumpuk masalah ke atas (pengadilan) penting kiranya ada perda ini, setiap permasalahan itu sudah selesai di desa," ujarnya.

Kajati Bali I Ketut Sumedana menjelaskan draf yang diajukan bersama Pemprov Bali ke dewan sudah disesuaikan dengan undang-undang dan kearifan lokal.

Dengan Undang-Undang KUHP Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku tahun depan maka sangat



DPRD Bali dan Kajati Bali I Ketut Sumedana mulai bahas Raperda Bale Kertha Adhyaksa Desa Adat di Bali, Denpasar, Kamis 7/8/2025. (ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari)

memungkinkan desa adat melalui kertha desa membentuk ruang penyelesaian konflik mengingat aturan desa adat diakui disana.

Ketut Sumedana juga menuliskan sanksi dalam Raperda Bale Kertha Adhyaksa dari yang ringan berupa teguran, menengah berupa

kerja sosial, dan berat denda sosial.

Namun tidak semua persoalan dapat diselesaikan di ruang ini seperti untuk kasus pembunuhan, pemerkosaan, atau konflik lahan yang pada akhirnya jalan satunya pengadilan. (ant)



Mengucapkan

**DIRGAHAYU
REPUBLIK INDONESIA**

80 Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju



BUPATI BADUNG
I WAYAN ADI ARNAWA, SH

**SELAMAT HARI JADI KE-67
PROVINSI BALI**

**67 AMUKTI
BALI HITA**
Mewujudkan Harmoni Bali Dwipa



WAKIL BUPATI BADUNG
BAGUS ALIT SUCIPTA, SH